PEMBAHASAN RAPERDA BPRS DIHAPUS

Realisasi Janji Kampanye Dipertanyakan

YOGYA (KR) - Dinamika rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai puncak. Hal ini seiring rencana penghapusan atau penundaan pembahasan raperda tersebut oleh kepala daerah kepada kalangan dewan. Realisasi janji kampanye kepala daerah pun dipertanyakan.

"Menurut kami, walikota dalam hal ini telah mengingkari atau menyimpang dari janji kampanye yang diutarakan kepada warga Kota Yogya sebagai pemenang (pemilukada) 2017. Jelas-jelas kita ketahui munculnya BPRS adalah dari RPJMD 2017-2022 yang sudah menjadi keputusan bersama DPRD dan walikota," urai Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, Kamis (26/8).

Perjalanan Raperda BPRS relatif panjang dan sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 dan 2021. Tahapannya tinggal pembentukan panitia khusus (pansus) guna membahas raperda. Dinamika di internal dewan cukup wajar karena perbedaan sudut pandang tiap fraksi yang menyikapi BPRS.

Rifki yang juga anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya ini mengungkapkan, puncaknya terjadi pada 19 Agustus 2021 lalu. Yakni ketika walikota menyampaikan surat ke DPRD terkait usulan perubahan pembahasan raperda tahun ini. "Yang paling menjadi pencermatan adalah dengan dihapusnya atau didrop Raperda BPRS oleh walikota," tandasnya.

Dalam surat yang disampaikan ke dewan tersebut terdapat beberapa alasan yang dikemukakan. Di antaranya perubahan peta persaingan bisnis bank syariah seiring penyatuan bank syariah nasional. Selain itu adanya rencana pemisahan BPD Syariah secara mandiri sehingga mendorong Pemkot untuk menyertakan modal ke BPD Syariah dibanding membuat BPRS sendiri.

Rifki menambahkan, ketika sudah masuk dalam RPJMD selama masa jabatan kepala daerah, maka seharusnya pembentukan BPRS merupakan produk bersama antara Pemkot dengan DPRD. Sehingga sudah seharusnya semua pihak konsisten dan menghormati keputusan tersebut.

"Jika beralasan kondisi ekonomi akibat pandemi, dalam raperda bisa kita amanahkan untuk mulai dikembangkan ketika keuangan Pemkot sudah memungkinkan," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, dari aspek jenis usaha BPRS memiliki bidang garapan yang sah dan menjadi salah satu strategi pembangunan nasional sebagaimana dalam UU Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan untuk memperkuat ekonomi syariah. Apalagi bank syariah dinilainya menjadi kebutuhan masyarakat, terbukti semua usaha perbankan mempunyai usaha bank syariah dan secara bisnis mempunyai bidang sendiri dan tidak mengganggu segmen bank konvensional.

Dirinya pun berharap masyarakat kususnya warga Kota Yogya harus mengetahui sikap yang sudah dilakukan dari awal pengusulan BPRS sampai saat ini dalam pengawalan. "Masyarakat akan tahu anggota dewan yang konsisten dengan keputusannya atau janjinya sendiri. Jangan sampai ini menjadi catatan masyarakat bahwa anggota dewan tidak bisa dipegang janjinya," ungkapnya. **(Dhi)-f**

DDII Yogya Adakan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Covid-19

KR-Franz Boedisoekarnanto

Pengurus Daerah DDII Kota Yogyakarta saat bersilaturahmi dengan jajaran Direksi KR.

YOGYA (KR) - Pengurus Daerah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Yogyakarta akan mengadakan Pelatihan Relawan Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Islamic Center Masjid Al Furqan, Nitikan Baru Yogyakarta, Minggu 29 Agustus 2021 pukul 08.30-15.00 WIB.

Ketua DDII Kota Yogyakarta Ahmad Mustafid MHum mengatakan, pelatihan akan diikuti 70 peserta dari pengurus/takmir masjid di Kota Yogyakarta. Pelatihan menghadirkan narasumber Nurhidayat (Kepala BPBD Kota Yogyakarta), Ustad Dudu Ridwanulhaq (Ketua Rohani Islam dan Tim Pemulasaraan Jenazah RSIY Yogyakarta) dan Ustad Haris Jaya Dipraga SPdI (Binrohis RSIY Yogyakarta).

"Kegiatan berbentuk bimbingan dan pelatihan, tanya jawab dan praktik," kata Ahmad Mustafid bersama jajaran saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB di Kantor Direksi *Kedaulatan Rakyat* (KR), Jalan Margo Utomo Yogyakarta, Kamis (26/8). Turut mendampingi Direktur Keuangan Imam Satriadi SH dan Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos.

Menurut Ahmad Mustafid, dasar pemikiran diselenggarakannya pelatihan ini karena pandemi Covid-19 sampai saat ini belum mereda. Sebagian umat yang meninggal karena terpapar Covid-19 membutuhkan penanganan yang cepat, aman dan sesuai dengan syariah Islam. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriyah 1443 H dan HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Adapun tujuan kegiatan ini yakni menumbuhkan kesadaran, kebersamaan dan kepedulian antar umat terutama dalam pemulasaraan jenazah Covid-19. Kemudian memberikan edukasi, melatih sekaligus menjadi relawan peduli Covid-19 dengan pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan hukum Islam, profesional dan aman. **(Dev)-f**

72 Hotel dan Restoran Tutup Permanen

YOGYA (KR) - Pelaku usaha maupun tenaga kerja bisnis perhotelan baik bintang maupun non bintang dan restoran di DIY semakin terpuruk terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang kembali diperpanjang sampai 30 Agustus 2021. Kebijakan yang masih belum memperbolehkan tempat wisata dibuka ini membuat sebanyak 72 pelaku usaha hotel dan restoran gulung tikar alias tutup permanen di DIY saat ini

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengakui hotel dan restoran yang tutup permanen semakin bertambah cukup banyak akibat kebijakan PPKM tersebut. Sebelumnya dilaporkan sebanyak 50-an hotel dan restoran yang tutup permanen, kini bertambah semakin banyak menjadi 72 hotel dan restoran di DIY.

"Sebanyak 72 hotel dan restoran anggota PHRI DIY melaporkan diri secara lisan, mereka menyatakan tutup permanen karena PPKM ini. Dampak kebijakan pengetatan sampai belum dibukanya tempat wisata tersebut sangatlah luar biasa," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (26/8).

Deddy mengatakan, dari jumlah hotel dan restoran yang dilaporkan tutup permanen tersebut rinciannya 42 hotel dan 30 restoran. Mayoritas hotel yang tutup permanen di DIY adalah hotel non bintang, sedangkan restoran mayoritas yang kecil. Laporan tersebut baru dari anggota PHRI DIY, diperkirakan hotel dan restoran yang bukan anggotanya lebih banyak lagi.

"Selain banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang gulung tikar, jumlah karyawan hotel dan restoran yang terdampak pun tinggi. Dari sekitar 60 ribu karyawan, 70 persen diantaranya sudah dirumahkan sejak awal pandemi sampai sekarang," tegasnya.

General Manager Hotel Ruba Grha Yogyakarta ini menyatakan nasib yang dialami sektor akomodasi dan restoran ini pun terjadi dan berimbas terhadap supplier dalam hal ini pelaku UMKM atau industri kreatif lainnya. Di sisi lain, uji buka pembukaan mal setidaknya memberikan sedikit angin segar meskipun tempat wisata belum boleh beroperasional sejak awal PPKM sampai sekarang.

"Kami telah meminta kejelasan kapan tempat wisata benar-benar dibuka karena berhubungan budgeting planning bagi pelaku usaha hotel dan restoran di DIY. Bisnis itu perlu persiapan matang dan rencana, tidak langsung asal-asalan butuh kepastian dan data," pungkasnya. **(Ira)-f**

PPMAY Minta Akses Malioboro Jangan Dibatasi

YOGYA (KR) - Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) berharap akses masuk ke Malioboro tidak perlu dibatasi dengan syarat surat vaksin dan lainnya. Cukup dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Juga penerapan Malioboro sebagai pedestrian dengan menutup lalu lintas masuk harus ditinjau kembali karena infrastruktur parkir dengan penataan PKL dinilai belum siap.

"Dalam kondisi pandemi dan PPKM saat ini saja omzet kami tidak tembus 10 persen, bagaimana jika nanti akses ditutup," tutur Ketua PPMAY Sadana Mulyono kepada wartawan, Kamis (26/8) siang, usai audiensi ke Ketua DPRD Kota Yogya.

Didampingi jajaran pengurus PPMAY lainnya, Sadana menyebutkan saat ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 belum mencapai 50 persen, padahal herd immunity baru tercapai setelah 80 persen masyarakat mendapat vaksin. "Jadi jika masuk Malioboro harus pakai surat telah vaksin jelas tidak bisa. Lebih baik dengan penerapan disiplin prokes seperti maksimal 50 persen masuk mal, makan di restoran maksimal 25 persen," tegas Sadana.

Demikian pula soal penertiban PKL yang dinilai sudah awut-awutan, menurutnya lebih mendesak dibanding penerapan uji coba penuh pedestrian di Malioboro dengan penutupan akses lalu lintas yang justru semakin memukul pelaku bisnis di kawasan Malioboro.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudyatmoko menyatakan penataan Malioboro pasti berdampak sosial. "2019 mulai dilakukan uji coba pedestrian di Malioboro, selama beberapa bulan, disusul kemudian pada 2020 pandemi Covid-19," ungkap Danang.

Danang berharap suasana kondusiif bisa diwujudkan dan tidak ada yang dirugikan. "Apalagi ada lebih dari 9.000 karyawan yang menggantungkan rezeki dari Malioboro. Penataan dari Tugu, Malioboro, Kraton harus terkoneksi dengan baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang ada sebagai kawasan strategis wajah Kota Yogya, evaluasi akan terus dilakukan," tegasnya. **(Vin)-f**

Bank Jateng Peroleh Penghargaan Sebagai Bank Terbaik 2021

SEMARANG - Bank Jateng di tengah pandemi COVID-19 saat ini tetap mempertahankan kinerja positifnya salah satu buktinya berhasil memperoleh penghargaan sebagai Bank Terbaik 2021 dengan kategori Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT di tengah pandemi COVID-19, Bank Jateng masih bisa menorehkan prestasi menjadi Bank Terbaik tahun 2021. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majalah Investor, Berita Satu Media Holding, dan dewan juri atas penghargaan yang dipercayakan kepada kami," kata Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Ony Suharsono.

Ony mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan dan penyemangat bagi Bank Jateng untuk tetap optimis dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan kinerja bisnis, mengembangkan inovasi produk, jasa, serta mengembangkan sinergi dan menguatkan integrasi bisnis demi kemajuan ekonomi.

"Penghargaan ini memberikan energi dan motivasi kepada kami untuk terus bekerja keras dan cerdas dalam meningkatkan fungsi Bank Jateng dalam perekonomian daerah. Sebagai bank regional salah satu fungsi kami adalah meningkatkan perekonomian daerah khususnya Jawa Tengah," kata Ony.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno menambahkan penghargaan tersebut juga merupakan apresiasi atas kinerja seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Supriyatno menjelaskan kinerja Bank Jateng tetap tumbuh pada semester 1 tahun 2021, tercermin dari aset Bank Jateng yang mengalami pertumbuhan 12,21 persen (yoy) atau sebesar Rp81,45 triliun.

Pertumbuhan tersebut didukung dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp67,81 triliun dengan pertumbuhan sebesar 17,18 persen (yoy) dan penyaluran kredit mencapai Rp51,89 triliun atau tumbuh 4,88 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 0,59 persen.

"Kami melihat pertumbuhan kredit tersebut masih di atas Jateng dan nasional, artinya, eksisting debitur kita masih cukup mempunyai produktivitas yang tinggi dan ini harus dijaga," kata Supriyatno.

Pertumbuhan kredit Bank Jateng, lanjut Supriyatno, utamanya ditopang oleh pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercatat tumbuh sebesar 16,42 persen (yoy) dengan porsi kredit UMKM mencapai lebih dari 25 persen dari total kredit Bank Jateng.

Sementara itu laba usaha selama enam bulan terakhir dilaporkan mencapai Rp1,09 triliun atau tumbuh sebesar 16,09 persen (yoy) dan hingga akhir Juli, laba usaha mencapai Rp1,3 triliun.Untuk rasio penyaluran kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) berada pada kisaran 76,52 persen; rasio current account saving account (CASA) mencapai 54,01 persen.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada para nasabah, pemegang saham, otoritas, dan masyarakat atas kepercayaannya, sehingga kinerja perseroan tetap mampu tumbuh positif," tutup Supriyatno.(*)